P-ISSN 2685-4287
E-ISSN 2549-4104

Samuka Vol 10 No 1 : hlm 48-59
SAMUKA
Jurnal Samudra Ekonomika
https://ejurnalunsam.id/index.php/jse

Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia

Aldi Riyadi[1] , Nurjannah[2], Nurlaila Hanum[3]
Email:aldiryadzein@gmail.com

[1,2,3,] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra Langsa

Received: 06/02/2026; Accepted:28/02/2026; Published: 27/03/2026

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana belanja sektor publik dan variasi suku bunga berdampak pada pendapatan nasional Indonesia, baik secara independen maupun bersama-sama, selama periode 2011 hingga 2023. Pendekatan metodologis kuantitatif digunakan, yang mencakup seluruh ekonomi nasional sebagai ruang lingkup analisis. Penelitian ini didasarkan pada data deret waktu sekunder yang dikumpulkan secara eksklusif dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Untuk pemrosesan dan evaluasi data, model regresi linier berganda diterapkan dengan dukungan perangkat lunak EViews 12, sebuah alat yang memungkinkan estimasi yang lebih tepat dari interaksi antara variabel yang dipelajari. Temuan menunjukkan bahwa, secara terpisah, belanja publik memiliki efek positif dan signifikan secara statistik terhadap pendapatan nasional; sebaliknya, suku bunga memiliki efek negatif, meskipun tidak signifikan secara statistik. Dalam analisis bersama, kedua faktor tersebut menentukan dan menunjukkan dampak yang signifikan terhadap perilaku pendapatan nasional. Oleh karena itu, ditegaskan kembali bahwa kebijakan fiskal yang didasarkan pada peningkatan belanja publik merupakan instrumen utama untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, sementara fluktuasi suku bunga, dalam jangka waktu yang dianalisis, tidak memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap pendapatan nasional.

Key words : Pengeluaran pemerintah, Suku bunga, Pendapatan Nasional,Kebijakan fiskal, Kebijakan moneter

PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi didefinisikan sebagai kondisi di mana pertumbuhan ekonomi dipertahankan pada tingkat yang berkelanjutan dan mengikuti lintasan yang teratur dari waktu ke waktu. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai pembangunan ekonomi suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, karena mencerminkan peningkatan pendapatan nasional secara keseluruhan. Dalam analisis ekonomi makro, pertumbuhan tersebut diukur melalui keseimbangan yang dicapai dalam penciptaan pendapatan nasional riil (Muliansyah & Gede, 2025). Dalam konteks ini, pendapatan nasional dianggap sebagai ukuran fundamental keberhasilan ekonomi suatu negara, karena secara komprehensif mewakili kondisi

perekonomiannya saat ini. Untuk penilaiannya, Produk Domestik Bruto (PDB) umumnya digunakan, yang dianggap sebagai alat utama untuk menangkap variasi dalam total produksi barang dan jasa (Rahmah & Mutfarida, 2024). Lebih lanjut, perhitungan pendapatan nasional menyediakan kerangka kerja analitis yang berguna untuk memahami hubungan timbal balik antara variabel-variabel ekonomi makro utama seperti output agregat, pendapatan, dan pengeluaran (Yusmiana, 2022).

Indikator utama yang mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi meliputi peningkatan pendapatan nasional yang berkelanjutan dan nilai tukar mata uang lokal yang stabil. Secara praktis, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan produksi suatu negara berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan penduduknya selama periode tertentu. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dianggap terjadi ketika pendapatan riil masyarakat dalam satu tahun melebihi pendapatan riil tahun sebelumnya. Dari perspektif ekonomi makro, fenomena ini bermanifestasi sebagai peningkatan PDB, yang menyiratkan peningkatan pendapatan nasional yang sesuai (Andriani et al., 2021).

Kemajuan ekonomi dapat dipahami sebagai peningkatan nilai tambah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian nasional (Rahmah & Mulfarida, 2024). Dalam hal ini, data yang disajikan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto Indonesia telah menunjukkan tren peningkatan yang stabil selama lima tahun terakhir, khususnya antara tahun 2019 dan 2023.

Tabel 1. Produk Domestik Bruto atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2019 -2023 (Milyar)

Tahun	PDB (Milyar)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2019	10.949.155,40	5,02 %
2020	10.722.999,30	-2,07 %
2021	11.120.059,70	3,7 %
2022	11.710.247,90	5,31 %
2023	12.301.393,60	5,05 %

Sumber: Bank Indonesia 2025

Tabel 1 menunjukkan lintasan kinerja ekonomi nasional berdasarkan perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) riil berdasarkan jenis pengeluaran pada periode 2019–2023, yang menunjukkan tren positif yang signifikan. Pada tahun 2019, perekonomian Indonesia menunjukkan tingkat pertumbuhan yang solid, mencapai 5,02%. Namun, tahun 2020 ditandai oleh perlambatan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan kontraksi PDB sebesar -2,07%, akibat langsung dari dampak ekonomi global akibat pandemi. Namun, mulai tahun 2021, Indonesia berhasil membalikkan tren negatif ini, mencatat pemulihan parsial dengan pertumbuhan sebesar 3,7%, yang kemudian meningkat pada tahun 2022 dan mencapai 5,31%. Meskipun angka tersebut sedikit menurun menjadi 5,05% pada tahun 2023, persistensi angka positif menunjukkan konsolidasi proses pemulihan ekonomi nasional(Badan Pusat Statistik, 2025).

Rahayu, (2023) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi metrik kinerja makroekonomi tetapi juga mencerminkan kualitas kesejahteraan kolektif. Mencapai pertumbuhan berkelanjutan mensyaratkan keseimbangan variabel-variabel makroekonomi fundamental. Sejalan dengan pandangan ini, Keynes berpendapat bahwa mekanisme pasar saja tidak menjamin lapangan kerja atau stabilitas yang optimal, sehingga membenarkan perlunya intervensi publik yang aktif melalui instrumen kebijakan fiskal dan moneter (Setiawan, 2018).

Kebijakan fiskal, yang dipahami sebagai pengelolaan pendapatan dan belanja sektor publik secara sengaja, dipahami sebagai alat strategis untuk mengoreksi fluktuasi ekonomi, mendorong aktivitas produksi, dan mendorong pemerataan pembangunan (Putri & Nugrohowati, 2023). Istilah "fiskal", yang berasal dari bahasa Latin fiscus, merujuk pada perbendaharaan Kekaisaran Romawi, yang bertanggung jawab atas administrasi keuangan pusat. Menurut Kamus Besar

P-ISSN 2685-4287
E-ISSN 2549-4104

Bahasa Indonesia (KBBI), konsep ini berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendapatan publik, terutama penerimaan pajak (Mujasmara et al., 2023).

Dari perspektif teoretis, kebijakan fiskal modern didasarkan pada postulat John Maynard Keynes, yang secara terbuka mempertanyakan asumsi-asumsi ekonomi klasik dalam menghadapi ketidakmampuannya merespons krisis struktural tahun 1930-an. Menolak gagasan bahwa pasar secara otomatis cenderung menuju kesempatan kerja penuh, Keynes mengusulkan bahwa belanja publik dapat bertindak sebagai katalisator permintaan agregat. Dalam pendekatan ini, belanja pemerintah tidak hanya memobilisasi sumber daya atau mengkompensasi ketidakaktifan sektor swasta, tetapi juga menghasilkan dampak pengganda pada tingkat produksi dan pendapatan (Mankiw, 1998).

Sebelum munculnya pemikiran Keynesian pada tahun 1920-an, belanja pemerintah dipahami semata-mata sebagai sarana untuk mendanai operasional negara, tanpa mempertimbangkan efek samping terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dalam hal ini, Tabel 2 mendokumentasikan perkembangan belanja publik tahunan di Indonesia antara tahun 2011 dan 2023, yang menawarkan gambaran komprehensif tentang perannya yang terus berkembang dalam kebijakan ekonomi nasional.

Tabel 2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Tahun 2011-2023 (Milyar)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah
2011	1.294.999,10
2012	1.491.410,20
2013	1.650.563,70
2014	1.777.182,80
2015	1.806.515,20
2016	1.864.275,10
2017	2.007.351,80
2018	2.213.117,80
2019	2.309.287,30
2020	2.595.481,10
2021	2.786.411,40
2022	3.096.262,70
2023	3.123.677,30

Sumber: Bank Indonesia 2025

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2, perilaku belanja publik di Indonesia antara tahun 2011 dan 2023 menunjukkan lintasan yang fluktuatif. Peningkatan belanja pemerintah yang signifikan terjadi pada tahun 2020 sebagai respons terhadap dampak negatif pandemi COVID-19, yang mengakibatkan penurunan drastis penerimaan pajak dan, secara bersamaan, peningkatan belanja yang signifikan yang ditujukan untuk memperkuat sistem kesehatan, menyediakan bantuan sosial, dan mengaktifkan stimulus ekonomi. Dari tahun 2021 hingga 2023, penerimaan negara mulai menunjukkan tren peningkatan, meskipun tingkat belanja tetap tinggi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Selama periode ini (2011–2023), pemerintah Indonesia mengadopsi pendekatan kebijakan fiskal ekspansif, yang ditandai dengan peningkatan belanja publik yang disengaja dan penerapan keringanan pajak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Jenis intervensi ini bertujuan untuk merevitalisasi permintaan agregat dan mengurangi dampak resesi siklus melalui stimulus anggaran.

Berbeda dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh otoritas moneter terutama bank sentral dengan mengendalikan variabel-variabel seperti jumlah uang beredar dan suku bunga. Tujuannya adalah untuk memengaruhi

tingkat permintaan agregat dan meminimalkan gangguan makroekonomi (Damanik, 2024) .Tujuan mendasar dari kebijakan ini meliputi menjaga stabilitas harga, meningkatkan pendapatan per kapita, dan memperluas kesempatan kerja.

Di Indonesia, Bank Sentral Bank Indonesia memainkan peran strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter, bertindak sebagai entitas otonom yang pengaruhnya berdampak langsung pada dinamika perekonomian nasional. Suku bunga merupakan instrumen sentral dalam kerangka ini, karena penurunannya dapat merangsang kredit konsumen dan investasi, sementara kenaikannya cenderung menghambat aliran modal asing ke dalam negeri, dengan efek samping pada investasi domestik.

Dalam gudang instrumen moneter Indonesia, Indonesia menerapkan dua pendekatan fundamental: kebijakan moneter ekspansif, yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan menurunkan suku bunga; dan kebijakan moneter kontraktif, yang bertujuan untuk membatasi sirkulasi moneter dan menaikkan suku bunga guna menahan tekanan inflasi. Tabel 3 mengilustrasikan tren utama suku bunga selama periode 2011–2023, yang mencerminkan arah dan pendekatan yang diadopsi oleh kebijakan moneter selama tahun-tahun tersebut.

Tabel 3 Tingkat Suku Bunga Bank IndonesiaTahun 2011 - 2023 (%)

Tahun	Tingkat Suku Bunga (%)
2011	6,00%
2012	5,75%
2013	7,50%
2014	7,75%
2015	7,50%
2016	4,75%
2017	4,25%
2018	6,00%
2019	5,00%
2020	3,75%
2021	3,50%
2022	5,50%
2023	6,00%

Sumber : Bank Indonesia 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, suku bunga acuan Bank Indonesia telah menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan, merespons variasi kondisi ekonomi domestik maupun perubahan lanskap keuangan global. Pada tahun 2011, suku bunga acuan berada di level 6,00%, dan sedikit menurun menjadi 5,75% pada tahun 2012. Kenaikan signifikan menjadi 7,50% tercatat pada tahun 2013, yang kemudian dilanjutkan dengan kenaikan lebih lanjut menjadi 7,75% pada tahun 2014. Setelah itu, tren penurunan yang berkelanjutan diamati, mencapai 4,25% pada tahun 2017. Namun, tren ini berbalik pada tahun 2018 dengan kenaikan menjadi 6,00%. Pada tahun 2019, suku bunga acuan kembali menurun menjadi 5,00%, dan dalam konteks pandemi COVID-19, suku bunga acuan secara bertahap diturunkan hingga minimum 3,75% pada tahun 2020 dan kemudian menjadi 3,50% pada tahun 2021. Menanggapi kenaikan inflasi, suku bunga acuan kembali naik, mencapai 5,50% pada tahun 2022 dan 6,00% pada tahun 2023.

Dari perspektif teoretis, Setiowati & Nugroho, (2021) berpendapat bahwa kebijakan fiskal menjadi penting setelah kontribusi John Maynard Keynes, yang berpendapat bahwa intervensi pemerintah melalui belanja publik dan pemungutan pajak merupakan mekanisme yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Sebaliknya, para ekonom klasik berpendapat bahwa kebijakan moneter lebih dominan, dengan alasan bahwa kebijakan fiskal, alih-alih menstimulasi perekonomian, justru dapat menimbulkan efek

P-ISSN 2685-4287
E-ISSN 2549-4104

"crowding out", yaitu perpindahan belanja swasta akibat kenaikan suku bunga, tanpa harus berdampak pada peningkatan pendapatan nasional.

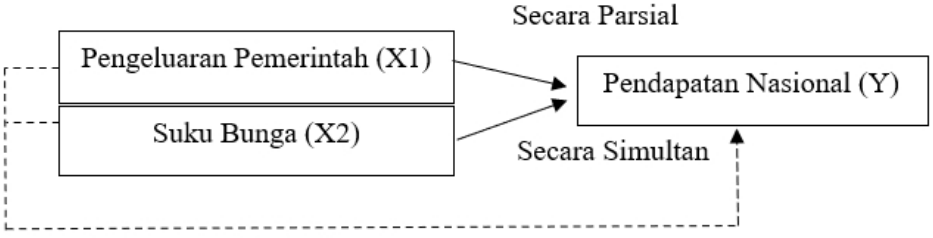
Secara umum, kebijakan fiskal dan moneter memainkan peran fundamental dalam pengelolaan ekonomi makro, bertindak sebagai instrumen untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan agregat. Kebijakan moneter didorong oleh stabilitas harga, sementara kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, implementasi gabungan keduanya dapat berfungsi sebagai strategi komprehensif untuk mencapai stabilitas inflasi dan keseimbangan neraca pembayaran (Halimah et al., 2024).

Dalam kasus Indonesia, berbagai studi telah mengungkapkan interaksi yang signifikan antara instrumen kebijakan ekonomi dan perilaku variabel-variabel ekonomi makro utama. Misalnya, studi oleh Aristina et al., (2020) menunjukkan bagaimana langkah-langkah fiskal dan moneter yang diadopsi antara tahun 2005 dan 2018 secara langsung memengaruhi evolusi pendapatan nasional, memperkuat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Demikian pula, Raysharie et al., (2024) menyoroti dampak substansial kedua kebijakan tersebut terhadap dinamika ekonomi makro, menggarisbawahi peran penting keduanya dalam membentuk pendapatan nasional.

Dalam konteks ini, pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor struktural yang membentuk pendapatan nasional sangat penting untuk merancang kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan. Episode inflasi tinggi baru-baru ini, ditambah dengan ketidakpastian ekonomi global yang terus-menerus, menimbulkan tantangan tambahan. Meningkatnya inflasi mengikis daya beli dan mengurangi konsumsi swasta, yang merupakan komponen penting pendapatan nasional. Di saat yang sama, kebijakan moneter yang restriktif seperti kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia dapat menghambat investasi dan pengeluaran rumah tangga.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter serta menilai dampak gabungannya terhadap pendapatan nasional. Analisis semacam ini sangat penting dalam lingkungan ekonomi saat ini, yang ditandai dengan transisi menuju kondisi struktural baru. Pemahaman yang tepat tentang cakupan dan batasan kebijakan ini akan memungkinkan para pembuat kebijakan publik untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, dan mendorong pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

Berdasarkan teoritis dan hubungan antar variabel yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis mencoba membuat skema penelitian yang menjelaskan terdapat 2 variabel bebas yaitu, pengeluaran pemerintah, suku bunga yang mempengaruhi pendapatan nasional (variabel terikat). Berikut gambar skema penelitian :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

HIPOTESIS

Adapun Hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

H1 : Diduga variabel Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia

H2 : Diduga variabel Suku Bunga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berada dalam lingkup ekonomi moneter, dengan fokus pada tiga variabel kunci: belanja publik, suku bunga, dan pendapatan nasional. Pendekatan penelitian kuantitatif diadopsi, yang dipahami sebagai prosedur ilmiah terstruktur yang secara sistematis mengkaji komponen, fenomena, dan interaksi yang ada. Metodologi ini dipilih karena kemampuannya memberikan pandangan objektif tentang hubungan antar variabel yang dianalisis. Penelitian ini dilakukan dalam konteks Indonesia, menggunakan deret waktu yang sesuai dengan periode 2011–2023, dan direncanakan akan dilaksanakan antara Juni dan Juli 2025.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh data deret waktu yang berkaitan dengan belanja publik, suku bunga, dan pendapatan nasional di Indonesia. Sampel penelitian ditentukan berdasarkan ketersediaan data lengkap untuk periode 2011–2023. Dengan demikian, sampel yang digunakan adalah seluruh data time series selama 13 tahun tersebut (total 13 observasi untuk masing-masing variabel). Pemilihan sampel didasarkan pada ketersediaan data deret waktu yang konsisten untuk ketiga variabel utama. Rentang waktu 2011–2023 dipilih karena selama periode tersebut data dari BPS untuk variabel pendatan nasional, data dari Bank Indonesia untuk Pengeluaran pemerintah dan data dari Bank Indonesia untuk Suku bunga tersedia lengkap dan telah melalui proses standardisasi. Dengan demikian, jumlah observasi dalam penelitian ini berjumlah 13 tahun. Jumlah sampel yang relatif kecil ini merupakan konsekuensi umum dalam penelitian makroekonomi berbasis data tahunan, meskipun demikian tetap memenuhi syarat untuk analisis regresi sederhana. Namun, ukuran sampel ini juga menjadi salah satu keterbatasan penelitian karena dapat mempengaruhi kekuatan statistik dalam mendeteksi hubungan kausal yang lebih kompleks.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Proses ini meliputi pengumpulan, penelaahan, dan evaluasi sumber-sumber resmi seperti publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, serta laporan dan dokumen relevan yang terkait dengan belanja publik, suku bunga, dan pendapatan nasional. Sumber data juga dilengkapi dengan referensi dari buku, jurnal ilmiah, dan publikasi lembaga pemerintah lainnya.

Tabel 4. Tabel Operasional Variabel

Variabel	Dimensi/Definisi	Indikator	Satuan	Sumber Data
Pendapatan Nasional (Y)	Nilai barang & jasa yang dihasilkan dalam perekonomian	Produk Domestik Bruto (PDB) harga konstan	Miliar Rupiah	BPS
Belanja Publik / Pengeluaran Pemerintah (X_1)	Realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah	Total belanja pemerintah per tahun	Miliar Rupiah	Kemenkeu
Suku Bunga (X_2)	BI 7-Day Reverse Repo Rate sebagai suku bunga acuan	Tingkat suku bunga per tahun	Persen (%)	Bank Indonesia

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengolah data. Menurut Sugiyono, (2010), teknik ini memungkinkan estimasi bagaimana suatu variabel dependen bervariasi berdasarkan dua atau lebih variabel independen yang berperan sebagai prediktor. Tujuannya adalah untuk menentukan pengaruh belanja publik dan suku bunga terhadap pendapatan nasional. Model matematika yang digunakan dinyatakan sebagai berikut:

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengolah data. Menurut Sugiyono, (2010), teknik ini memungkinkan estimasi bagaimana suatu variabel dependen bervariasi berdasarkan dua atau lebih variabel independen yang berperan sebagai prediktor. Tujuannya adalah untuk

P-ISSN 2685-4287
E-ISSN 2549-4104

menentukan pengaruh belanja publik dan suku bunga terhadap pendapatan nasional. Model matematika yang digunakan dinyatakan sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = \beta_0 + \beta_1 G + \beta_2 i + e}$$

Dengan keterangan : Y adalah Pendapatan Nasional, G adalah Pengeluaran Pemerintah, i adalah Suku Bunga, β_0 adalah Konstanta, β_1,β_2 adalah Koefisien Regresi, dan merupakan Error.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Secara Parsial

Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah dan suku bunga terhadap pendapatan nasional di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji-t)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7,885712	0,677016	11,64775	0,0000
G	0,566205	0,044859	12,62176	0,0000
i	-0,678573	0,895434	-0,757815	0,4660

Source: Hasil Olahan Eviews, 2025

Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda, konstanta memiliki nilai sebesar 7,885712, yang menunjukkan bahwa ketika belanja pemerintah (G) dan suku bunga (i) berada pada kondisi konstan, pendapatan nasional tetap berada pada tingkat dasar sebesar 7,885712 satuan. Variabel belanja pemerintah memiliki koefisien positif sebesar 0,566205 dengan nilai signifikansi 0,0000, sehingga secara statistik terbukti berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan belanja pemerintah sebesar satu satuan akan meningkatkan pendapatan nasional sebesar 0,566205 satuan, sehingga belanja pemerintah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan pendapatan nasional. Sebaliknya, variabel suku bunga menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,678573 dengan nilai probabilitas 0,4660, yang berarti tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 5 persen. Dengan demikian, suku bunga tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap pendapatan nasional dalam model ini, meskipun arah koefisien yang negatif mencerminkan bahwa kenaikan suku bunga cenderung menekan aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan, hasil ini memperlihatkan bahwa belanja pemerintah berperan dominan dalam memengaruhi pendapatan nasional, sementara suku bunga tidak memberikan kontribusi signifikan selama periode yang diteliti.

Hasil Pengujian Secara Simultan

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Tabel 12. Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji-F)

F-statistic	105,9178
Prob (F-statistic)	0,000000

Source: Hasil Olahan Eviews, 2025

Berdasarkan hasil yang dilaporkan pada Tabel 12, model ekonometrika yang diuji signifikansi bersama (uji F) menghasilkan nilai F hitung sebesar 105,9193, disertai probabilitas

terkait yang hampir nol (p = 0,000000), jauh lebih rendah daripada tingkat signifikansi konvensional sebesar 5%. Temuan ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa, dari perspektif statistik, model ini signifikan secara global, yang menyiratkan bahwa variabel independen yang dipertimbangkan pengeluaran pemerintah dan suku bunga ketika dievaluasi secara simultan, memiliki dampak bersama yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu tingkat pendapatan nasional di Indonesia selama periode penelitian.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah presentase total varian dependen yang dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 13. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0,954922
Adjusted R-squared	0,945906

Source: Hasil Olahan Eviews, 2025

Dari analisis yang disajikan pada Tabel 13, dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan perangkat lunak ekonometrika EViews, terlihat bahwa model tersebut menghasilkan koefisien determinasi yang disesuaikan (R^2 yang disesuaikan) sebesar 0,9459. Berdasarkan prinsip dasar statistika inferensial, indikator ini seharusnya berada dalam rentang ($0 < R^2 < 1$), yang sebagian besar benar dalam kasus ini. Tingkat R^2 yang disesuaikan yang tinggi ini memungkinkan kita untuk menegaskan bahwa sekitar 94,59% variasi pendapatan nasional dapat dikaitkan dengan aksi gabungan variabel penjelas yang tercakup dalam model, yaitu belanja publik dan suku bunga. Sisa 5,41% variabilitas tersebut berkaitan dengan faktor-faktor yang tidak termasuk dalam spesifikasi model saat ini, yang menyoroti keberadaan determinan eksternal tambahan yang berada di luar cakupan penelitian ini tetapi berpotensi memengaruhi perilaku variabel dependen.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Nasional

Temuan studi ini menunjukkan bahwa belanja publik memberikan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pendapatan nasional Indonesia selama periode 2011–2023. Hasil yang diperoleh dari model regresi linier berganda menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah sebesar 1% diperkirakan akan mengakibatkan peningkatan pendapatan nasional sebesar 0,566202 miliar rupiah. Sebaliknya, penurunan belanja pemerintah dengan jumlah yang sama akan menyebabkan penurunan pendapatan nasional secara proporsional. Hubungan ini didukung oleh tingkat signifikansi 0,0000, yang jauh di bawah ambang batas kritis 0,05, yang menunjukkan bukti statistik yang kuat mengenai validitas efek yang diamati. Dampak ini dapat dikaitkan dengan peran fundamental belanja publik dalam merangsang sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang ekspansinya secara langsung mendorong aktivitas ekonomi agregat. Lebih lanjut, ketika sumber daya publik dialokasikan untuk program penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran (Fauziah, 2024). Hal tersebut berkontribusi pada peningkatan tingkat pendapatan dan konsolidasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Premis ini konsisten dengan teori Keynesian, yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan nasional ditentukan oleh pengeluaran konsumsi, investasi, belanja publik, dan ekspor neto.

Selain itu, korelasi positif antara belanja pemerintah dan pendapatan nasional menyoroti pengoperasian pengganda fiskal, sebuah mekanisme di mana setiap unit tambahan belanja publik

P-ISSN 2685-4287
E-ISSN 2549-4104

berpotensi mendorong peningkatan output ekonomi melampaui nilai awalnya (Ujung et al., 2024). Fenomena ini menjadi lebih relevan dalam skenario di mana perekonomian beroperasi di bawah tingkat pemanfaatan sumber daya optimalnya, seperti dalam situasi setengah pengangguran, sehingga memungkinkan intervensi fiskal berdampak signifikan terhadap ekspansi permintaan agregat. Dalam konteks ini, belanja publik melampaui fungsi tradisionalnya sebagai alat alokasi anggaran, dan mengukuhkan dirinya sebagai pilar penting dalam arsitektur stabilisasi makroekonomi. Oleh karena itu, perumusan kebijakan fiskal yang tidak hanya sehat secara teknis tetapi juga adaptif terhadap fluktuasi siklus sangat penting untuk mempertahankan lintasan pertumbuhan ekonomi. Koordinasi yang efektif antara volume belanja dan kualitas pelaksanaannya muncul sebagai syarat mutlak untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan tangguh.

Hasil yang diperoleh konsisten dengan hipotesis yang diajukan dan penelitian sebelumnya, seperti penelitian Roosmanita & Marbun, (2022) yang menegaskan bahwa belanja publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan nasional. Senada dengan itu, Anitasari & Soleh, (2015) juga menyimpulkan bahwa belanja pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu, memperkuat gagasan bahwa alokasi belanja negara yang efisien untuk sektor-sektor produktif dapat merangsang perekonomian. Lebih lanjut,Zahari, (2017) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa belanja publik berkontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, terutama melalui pembiayaan sektor-sektor utama seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Konvergensi studi-studi ini menggarisbawahi peran krusial belanja publik sebagai pendorong pembangunan ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional.

Pengaruh Suku Bunga Terhadap Pendapatan Nasional

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel suku bunga tidak memiliki dampak yang signifikan secara statistik terhadap pendapatan nasional Indonesia selama periode 2011–2023, bahkan menunjukkan hubungan negatif. Berdasarkan estimasi regresi linier berganda, koefisien yang terkait dengan suku bunga adalah -0,006786, yang menyiratkan bahwa kenaikan suku bunga sebesar satu poin persentase akan menyebabkan penurunan pendapatan nasional sekitar 0,006786 miliar rupiah. Sebaliknya, penurunan suku bunga dengan proporsi yang sama akan menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang setara. Lebih lanjut, nilai signifikansi statistik untuk variabel ini adalah 0,4660, jauh di atas ambang batas kritis 0,05, yang menegaskan bahwa suku bunga tidak memiliki dampak konklusif terhadap pendapatan nasional selama periode pengamatan. Situasi ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa kenaikan suku bunga cenderung menghambat aktivitas ekonomi karena meningkatkan biaya uang dan membatasi jumlah uang beredar, yang mengakibatkan penurunan permintaan agregat. Seiring dengan kontraksi jumlah uang beredar, investasi juga cenderung menurun, yang secara langsung memengaruhi tingkat produksi dan, akibatnya, pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan ini sejalan dengan temuan Putri Charnova & Riofita, (2025) yang juga mengamati bahwa suku bunga memiliki pengaruh negatif, meskipun tidak signifikan, terhadap pendapatan nasional. Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian Sari & Anggadha, (2020)yang berpendapat bahwa terdapat hubungan positif antara suku bunga dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Disparitas ini dapat disebabkan oleh perbedaan periode penelitian, metodologi yang diterapkan, atau konteks makroekonomi spesifik yang memengaruhi hubungan antara suku bunga dan aktivitas ekonomi dalam setiap kasus.

KESIMPULAN

Dari analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa belanja publik memiliki dampak positif dan signifikan secara statistik terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Hal ini menyiratkan bahwa peningkatan belanja pemerintah merupakan pendorong yang efektif bagi pertumbuhan pendapatan nasional selama periode yang dianalisis. Sebaliknya, suku bunga menunjukkan pengaruh negatif, meskipun tidak signifikan secara statistik, yang menunjukkan bahwa perubahan suku bunga dalam interval waktu yang dipertimbangkan tidak memiliki dampak substansial terhadap fluktuasi pendapatan nasional. Lebih lanjut, hasil uji F menunjukkan bahwa, secara bersama-sama, belanja publik dan suku bunga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pendapatan nasional, yang memvalidasi relevansi model ekonometrika yang diadopsi. Namun demikian, kesimpulan ini perlu dipahami dalam konteks keterbatasan penelitian. Jumlah observasi yang hanya terdiri dari 13 tahun dapat membatasi ketepatan estimasi dan kekuatan inferensi statistik. Oleh karena itu, temuan ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara luas ke kondisi jangka panjang atau ke seluruh faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Penelitian lanjutan dengan cakupan data lebih panjang dan variabel tambahan diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan robust mengenai dinamika kebijakan fiskal dan moneter.

SARAN

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan agar pemerintah terus meningkatkan pengeluaran pada sektor-sektor strategis yang berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pengeluaran pada sektor-sektor tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan nasional dalam jangka panjang. Selain itu, kebijakan fiskal yang diterapkan perlu disesuaikan secara adaptif terhadap dinamika ekonomi global dan domestik, khususnya dalam menghadapi potensi gejolak atau krisis ekonomi di masa mendatang. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan waktu diperluas serta mempertimbangkan variabel-variabel lain yang juga berpengaruh terhadap pendapatan nasional, seperti pajak, tingkat pengangguran, investasi asing, nilai tukar, dan perdagangan internasional. Analisis yang lebih komprehensif juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau metode ekonometrika yang lebih kompleks agar mampu menggambarkan hubungan yang lebih dinamis antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pendapatan nasional.

P-ISSN 2685-4287
E-ISSN 2549-4104

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, V. , Muljaningsih, S. , & Asmara, K. (2021). Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing, Ekspor, Utang Luar Negeri, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi. Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 10(02). Http://Dx.Doi.Org/10.35906/Je001.V10i2.777

Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 3(2). Https://Doi.Org/10.37676/Ekombis.V3i2.139

Aristina, K., Juliprijanto, & Prasetyanto, P. K. (2020). Analisis Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2005-2018. DINAMIC: Directory Journal Of Economic, 2(2), 403–414. Https://Doi.Org/10.31002/Dinamic.V2i2.1372

Badan Pusat Statistik. (2025). Ekonomi Indonesia Tahun 2024 Tumbuh 5,03 Persen (C To C) .

Damanik .D. (2024). KEBIJAKAN MONETER. EKONOMI MONETER.

Fauziah, N. M. A. M. (2024). Peran Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Pengendalian Inflasi Dan Pengangguran. Peran Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Pengendalian Inflasi Dan Pengangguran.

Halimah, U. N., Wullandari, M., Rivaldo, A. D., & Noviarita, H. (2024). Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Journal Of Social Science And Multidisciplinary Analysis, 1(4), 31–50.

Mankiw, N. G. (1998). Principles Of Microeconomics (Vol. 1). Elselvier.

Mujasmara, F. D., Panggabean, R. T. T., Muliana, R. S., Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian Di Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 2986–2997.

Muliansyah, E., & Gede, I. K. (2025). Pengantar Ekonomi Makro. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Putri Charnova, A., & Riofita, H. (2025). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Ekonodinamika: Jurnal Ekonomi Dinamis, 7(2).

Putri, W. N., & Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati. (2023). Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pendapatan Nasional Di Negara Asean. Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan, 2(2). Https://Doi.Org/10.20885/JKEK.Vol2.Iss2.Art5

Rahayu, H. C. (2023). Analisis Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, 77–85. Https://Doi.Org/10.37034/Infeb.V5i1.198

Rahmah, Z. Z., & Mutfarida, B. (2024). Peranan Pendapatan Nasional Sebagai Maslahah Ekonomi Dalam Kerangka Ekonomi Islam. JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI, 1(2), 67–78. Https://Doi.Org/10.61722/Jemba.V1i2.98

Raysharie, P. I., Alviandi, R., Marbun, E. T. N., Sirait, L. R. A., Azzahra, N. , M. R., & Aulia, S. (2024). Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Kasus Studi Dalam Konteks Ekonomi Makro. Research Accounting And Auditing Journal, , 1(2), 21–32.

Roosmanita, R., & Marbun, J. (2022). Pengaruh Ekspor, Investasi, Konsumsi Rumah Tangga, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012-2021. In Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen PNJ, Vol (3).

Sari, S., & Anggadha Ratno, F. (2020). Analisis Utang Luar Negeri, Sukuk, Inflasi Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2019. Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi, 5(2), 91–100.

Setiawan, H. (2018). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi Di Indonesia Dengan Model Structural Vector Autoregression (Svar). Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, 3(2), 23–43. Https://Doi.Org/10.21067/Jrpe.V5i2.4661

Setiowati, T. A. H., & Nugroho, R. Y. Y. (2021). Pengaruh Kebijakan Moneter Dan Fiskal Terhadap Pengangguran Di Indonesia. JDEP, 4(1), 55–63. Https://Doi.Org/10.33005/Jdep.V4i1.205

Sugiyono, P. D. (2010). Metode Peneliian. Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.

Ujung, H., Farhan, J. M., & Syahputra, D. F. (2024). The Influence Of Village Funds On The Development Of Village Economic Potential: A Case Study. International Review Of Economics And Financial Issues, 1(2), 73–84. Https://Doi.Org/10.62941/Irefi.V1i2.29

Yusmiana, G. (2022). Resume Ekonomi Makro Syariah: Analisis Pendapatan Nasional Dalam Islam.

Zahari, M. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. EKONOMIS: Journal Of Economics And Business, 1(1), 180–196. Https://Doi.Org/10.33087/Ekonomis.V1i1.18